



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bangka Pos Babel Pos Radar Bangka
 Babel News Rakyat Pos Lainnya : _____

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

2
0
1
9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Kades Nangka Dilaporkan Warga, Diduga Korupsi Dana Desa

TOBOALI - Warga Desa Nangka Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan (Basel) melaporkan Kades Nangka ke - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Halaman 2

Kades (dari Halaman 1)

Bangka Belitung (Babel). Laporan warga ini terkait dugaan korupsi empat proyek Infrastruktur Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sepanjang tahun anggaran 2018.

"Telah kami laporkan dugaan tindak korupsi anggaran dana desa Nangka ke Kejati Babel. Laporan ini ditandatangani 158 warga dan ditembuskan ke KPK RI dan BPK Babel. Kenapa kami laporkan ? Karna diduga banyak terjadi penyimpangan dan terjadi monopoli pekerjaan," ujar Jamian (63) didampingi Supar (52) dan Saputra (27), kepada wartawan, Sabtu (4/5/2019).

Dijelaskan Jamian, proyek yang dikerjakan dalam satu paket seperti pembangunan Podium, pembangunan Pagar Penahan Tanah dan Pengerukan Lapangan Bola Desa Nangka.

"Pekerjaan ini dikerjakan satu paket dengan dana Rp315 juta. Dalam proyek ini diduga terjadi selisih pagu dana dengan biaya keseluruhan sekitar 42 persen atau setara Rp137 juta,"katanya.

Sedangkan untuk proyek pembangunan pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) desa dengan anggaran dana mencapai Rp91 juta, diperkirakan hanya menghabiskan biaya Rp44,2 juta. " Dalam proyek ini diduga terjadi selisih sekita

tar 51 persen atau senilai Rp46 juta,"cetusnya.

Begitu pula dengan pembangunan gapura atau pintu gerbang. Pagu dana yang tertera di papan proyek senilai Rp98 juta. Berdasarkan perhitungan pelapor, pembangunan gapura ini hanya memakan biaya sekitar Rp35,23 juta atau terjadi selisih biaya pembangunan sekitar 64 persen atau senilai Rp.62,370 juta.

"Dan ada pembangunan searing dengan pagu dana sekitar Rp.68 juta. Menurut pelapor, biaya sebesar itu sangat tidak wajar. Berdasarkan perhitungan mereka terjadi selisih sekitar 50 persen atau senilai Rp35,3 juta. Dari penggunaan anggaran dana desa Nangka kecamatan Air Gegas tahun 2018 diduga terjadi kerugian negara senilai Rp233,9 juta,"tegas Jamian seraya meminta pihak Kejati dapat segera menindaklanjuti laporan warga dan memeriksa Kades Nangka berikut dengan harta kekayaannya.

Kades Nangka : Kami Bekerja Sesuai RAB

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Nangka, Sumantri menepis dugaan dugaan korupsi yang dituding warganya. Menurutnya dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan dana desa dan ADD Tahun 2018 sudah terbentuk TPK untuk

melaksanakan kegiatan. Selain itu juga sudah dilakukan tahapan - tahapan seperti musyawarah.

" Kita maklumi adanya laporan warga karna ada yang pro dan kontra. Kami bekerja sesuai dengan RAB yang ada dari PU. Selain itu, anggaran seluruh desa di kabupaten Basel untuk kegiatan fisik tahun 2018 belum diperiksa inspektorat," ujar Sumantri, Minggu (5/5/2019).

Menurut Kades, sebelumnya dia pernah diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan (Basel) pada bulan Maret 2019, terkait adanya laporan tersebut.

"Kalau untuk total keseluruhan dana dari anggaran dana desa (ADD) Desa Nangka Tahun 2018 senilai kurang lebih Rp2,1 Miliar," ujar Sumantri.

LSM TOMBOK Siap Kawal Laporan Warga

Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tombok (Tim Operasional Masyarakat Bongkar Korupsi), Mawardi mengatakan, LSM Tombok bersama warga Nangka, Kecamatan Airgegas sudah melaporkan dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) Tahun 2018 terjadi di Desa Nangka ke Kejati Babel.

" Laporan dilakukan karena warga resah setelah penggunaan dana desa dan ADD Tahun 2018 tidak sesuai dengan aturan. Pada

hal, transparansi penggunaan dana desa dan ADD Tahun 2018 sangat dibutuhkan warga dan ternyata warga menemukan dugaan korupsi. Kasus ini sudah dilaporkan ke Kejati Babel,"ujarnya kepada Radar Bangka, Sabtu(4/5/2019), malam.

Mawardi berharap kepada pihak Kejaksaan agar segera menindak lanjuti laporan tersebut serta mengusut tuntas dugaan penyelewengan uang negara yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

" Ada indikasi dugaan mark-up DD dan ADD Desa Nangka tahun anggaran 2018 kemarin oleh pengguna anggaran di tingkat desa sesuai berdasarkan laporan warga Desa Nangka. Laporan ini juga dilaporkan ke KPK RI sampai hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya," jelas Mawardi.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Babel, Roy Arland ketika dihubungi Radar Bangka, Minggu (5/5/2019) sekitar pukul 18.45 WIB mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi dari warga Desa Nangka terkait dugaan korupsi Dana Desa dan ADD tersebut.

" Belum ada di saya, nanti kita cari tau disposisi surat kemana. Tapi secara WA saya sudah mendapatkan informasi tersebut," ujar Roy singkat. (RB)